KOP BADAN USAHA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kepada |
| Nomor LampPerihal | ::: Permohonan Surat Izin Usaha Penanaman Modal | Yth. | Bapak Gubernur Nusa Tenggara BaratCq. Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi NTB |

 Dengan hormat,

 Yang bertanda tangan dibawah ini :

 Nama :

 No. KTP :

 Pekerjaan :

 Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Penanaman Modal dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan tentang perusahaan

1. Nama Lembaga/

 Badan Usaha :

1. Alamat :
2. Pimpinan/Kepala :
3. Nomor Telp. :
4. Akta Pendirian
	* + - 1. Nomor & Tanggal

 /perubahannya :

* + - * 1. Notaris :
				2. Pengesahan :
				3. Nilai Investasi

(diluar Harga Tanah

dan Bangunan) :

B. Keteragan Rencana Kegiatan/Usaha

1. Rencana Kegiatan :
2. Lokasi :

a. Desa :

* 1. Kecamatan :
	2. Kabupaten :
	3. Provinsi :
1. Luas :

 Terlampir disampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin usaha/ Izin Kementerian/ Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
2. Rekaman akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
3. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari :
4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa :
* Akta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan, atau
* Sertifikat ha katas tanah, dan
* IMB.
1. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
* Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
* Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.
1. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai,bila :
* Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam satu bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi;
* Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
* Afiliasi sebagaimana dimaksud diatas, apabila satu grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan.
1. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
2. Rekaman izin gangguan (HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Perda setempat;
3. Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin gangguan dan/atau SITU;
4. Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin gangguan (HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan/pemilik gedung.
5. Rekaman dokumen dan persetujuan pengesahan AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL;
6. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha :
7. Jasa perdagangan;
8. Bidang usaha lainnya bila diperlukan.
9. Tanda terima penyampaian LKPM;
10. Rekomendasi dari kementerian/lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
11. Permohonan ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
12. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan;
13. Surat pernyataan yang memuat :
14. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
15. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
16. Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha;
17. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

Mataram, ……………………………….20……….

Pimpinan Perusahaan

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

* Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTB di Mataram